



**BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 33 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS TENAGA KERJA  
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang

HP

undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1108);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 18);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMBAWA.**

kp.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian/ dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

(1) UPT pada Dinas terdiri atas:

- a. UPT Balai Latihan Kerja yang wilayah kerjanya se Kabupaten Sumbawa; dan
- b. UPT Kota Terpadu Mandiri Labangka yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Labangka, Kecamatan Plampang dan Kecamatan Maronge.

- (2) Klasifikasi UPT Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan UPT Kelas A.
- (3) Klasifikasi UPT Kota Terpadu Mandiri Labangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan UPT Kelas B.

**BAB III  
KEDUDUKAN**

**Pasal 3**

UPT pada Dinas dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

*ff.*

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Latihan Kerja terdiri atas:
  - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan
  - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Susunan Organisasi UPT Kota Terpadu Mandiri Labangka terdiri atas:
  - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan
  - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah jabatan pelaksana.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT Balai Latihan Kerja dan UPT Kota Terpadu Mandiri Labangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu UPT Balai Latihan Kerja

### Pasal 5

- (1) UPT Balai Latihan Kerja dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas.
- (2) Kepala UPT Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pelatihan kerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Balai Latihan Kerja menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja UPT Balai Latihan Kerja;
  - b. pelaksanaan pelatihan kerja dan uji keterampilan;
  - c. pemeliharaan sarana dan prasarana UPT;
  - d. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan operasional UPT Balai Latihan Kerja; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 6

Rincian tugas Kepala UPT Balai Latihan Kerja adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja UPT Balai Latihan Kerja;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pelatihan kerja;

Af.

- c. melaksanakan pelatihan kerja dan uji keterampilan;
- d. melaksanakan pengkajian dan analisis teknis pelatihan kerja;
- e. melaksanakan program kerja sama pelatihan;
- f. melaksanakan penyebaran informasi pelatihan kerja;
- g. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Balai Latihan Kerja;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Balai Latihan Kerja; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**UPT Kota Terpadu Mandiri Labangka**

**Pasal 7**

- (1) UPT Kota Terpadu Mandiri Labangka dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Transmigrasi Dinas.
- (2) Kepala UPT Kota Terpadu Mandiri Labangka mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembangunan dan pengembangan kawasan Kota Terpadu Mandiri Labangka.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Kota Terpadu Mandiri Labangka menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja UPT Kota Terpadu Mandiri Labangka;
  - b. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri Labangka;
  - c. pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Kota Terpadu Mandiri Labangka;
  - d. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan operasional UPT Kota Terpadu Mandiri Labangka; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 8**

Rincian tugas Kepala UPT Kota Terpadu Mandiri Labangka adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja UPT Kota Terpadu Mandiri Labangka;
- b. menyusun rencana kegiatan pengelolaan pembangunan dan pengembangan kawasan Kota Terpadu Mandiri Labangka;
- c. melaksanakan pengembangan agribisnis dan agroindustri kawasan Kota Terpadu Mandiri Labangka;

Yf.

- d. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan, sosial dan budaya masyarakat di kawasan Kota Terpadu Mandiri Labangka;
- e. melaksanakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan utilitas kawasan Kota Terpadu Mandiri Labangka;
- f. melaksanakan pembangunan dan pengembangan tata ruang kawasan Kota Terpadu Mandiri Labangka;
- g. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Kota Terpadu Mandiri Labangka;
- h. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Kota Terpadu Mandiri Labangka; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja UPT;
  - b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### Pasal 10

Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jf.

## BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 11, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat membentuk Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII JABATAN

### Pasal 13

- (1) Kepala UPT Balai Latihan Kerja merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVa.
- (2) Kepala UPT Kota Terpadu Mandiri Labangka dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Balai Latihan Kerja merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVb.

## BAB VIII KEPEGAWAIAN

### Pasal 14

Para pejabat di lingkungan UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lainnya yang sah.

## BAB X TATA KERJA

### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan UPT, wajib menerapkan prinsip

kp.

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPT serta dengan instansi lain di luar lingkungan UPT sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 17

Kepala UPT wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan tembusan laporan disampaikan kepada perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural di lingkungan UPT pada Dinas tetap menjalankan tugas, fungsi dan tata kerjanya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694).

### BAB XII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 7, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 2 Januari 2024

M. BUPATI SUMBAWA,  


X f. MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



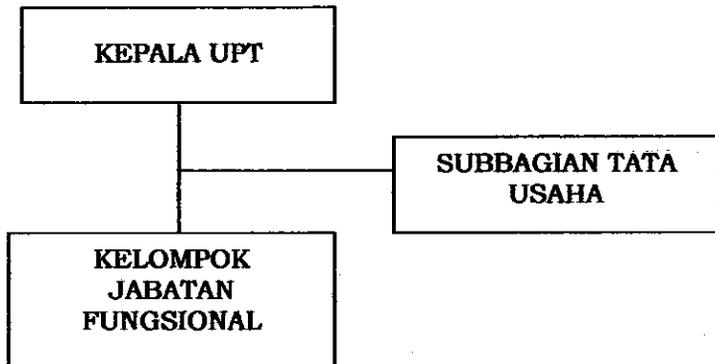
DIRMAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024 NOMOR 33

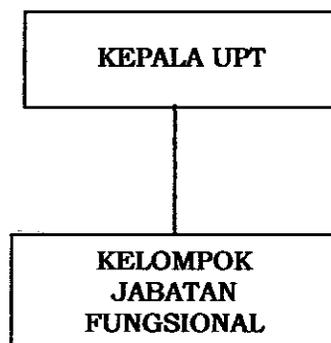
f.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 33 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SUMBAWA

I. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KELAS A



II. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KELAS B



BUPATI SUMBAWA,  
*[Signature]*  
X P. MAHMUD ABDULLAH